

## Pengangguran dan Kemiskinan di Banjarmasin Meningkat, Penerima Bansos Bertambah



Sumber gambar

<https://kalsel.prokal.co/read/news/46665-pengangguran-dan-kemiskinan-di-banjarmasin-meningkat-penerima-bansos-bertambah.html>

Angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Banjarmasin meningkat. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran meningkat menjadi 8,57 persen pada 2021. Bandingkan dengan 2020 yang berada di angka 8,32 persen. Demikian pula dengan angka kemiskinan. Tahun 2020 berada di angka 4,39 persen, pada tahun 2021 menjadi 4,89 persen.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Banjarmasin, Isa Anshari mengatakan, pemicunya adalah pandemi covid dan kebijakan pembatasan yang mengikutinya. “Rata-rata terdampak PHK, usahanya gulung tikar, atau berpindah ke usaha lain,” ujarnya di Balai Kota.

Seperti menjahit, membuat kue, dan menenun kain Sasirangan. “Khusus mereka yang di-PHK, kami memberi pelatihan sesuai bidang sebelumnya,” jelasnya. “Kami berharap warga tetap berusaha. Tak berkecil hati. Masih ada upaya di tengah pandemi ini,” tutup Isa.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Iwan Restianto memperkuat pernyataan Isa. “Pada tahun 2020, ada 31.307 orang miskin. Sedangkan pada 2021 naik menjadi 34.839 jiwa,” sebutnya. Soal langkah konkret, wali kota sudah lama mencanangkan program WUB (Wirausaha Baru). Perihal jaring pengaman sosial, Iwan menyebutkan ada penambahan bantuan.

Tahun lalu ada 11 ribu penerima. Tahun ini menjadi 13 ribu penerima. Baik penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penambahan itu sesuai dengan usulan dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kemudian, penerima bansos juga tak hanya orang miskin. Tapi mereka yang rentan miskin agar mereka tidak menjadi miskin,” lanjutnya.

Dia juga berharap tak muncul kecemburuan di tengah masyarakat. “Karena bantuannya memang tidak sama. Tergantung klasifikasi kemiskinan yang dialami. Jadi tak bisa dipukul rata,” pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kassel.prokal.co/read/news/46665-pengangguran-dan-kemiskinan-di-banjarmasin-meningkat-penerima-bansos-bertambah.html>, 30 Maret 2022
2. <https://jejakrekam.com/2022/03/30/angka-kemiskinan-dan-pengangguran-banjarmasin-meningkat-simak-poin-lkpj-walikota-ibnu-sina/> 30 Maret 2022

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”

- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan

pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.